



Implementasi Sebuah Program Berbasis Riset Aksi Dalam Meningkatkan Kualitas Program

Mansyur Hidayat Pasaribu¹

¹SMP Negeri 1 Hampan Perak

Corresponding Author: ✉ mansyurpasaribu@yahoo.co.id

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat imlementasi sebuah program yang di jalankan berbasis riset aksi demi mendapatkan kualitas yang baik. Metode penelitian ini yaitu library riset, dan hasil penelitian ini yaitu Implementasi program ádalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan. Secara umum, metode RAP terbagi dalam dua tipe, yakni Eksplanatif dan Tematik. RAP Eksplanatif memfasilitasi komunitas/masyarakat untuk berpartisipasi dalam menganalisis kebutuhan, permasalahan, dan solusinya sebelum merencanakan aksi transformatif. Sedangkan RAP Tematik menganalisis program aksi transformatif yang sudah berjalan, sebagai alat evaluasi dan pengamatan (monitoring).

Kata Kunci

Program, Riset Aksi, Kualitas

PENDAHULUAN

RAP lebih didasari paradigma fenomenologis, atau seringkali pula disebut paradigma interpretivisme, subyektifisme, atau definisi sosial. Paradigma ini didasari asumsi bahwa realitas sosial berlaku secara khas, subyektif dan kontekstual secara ruang dan waktu, sehingga Pelaksana Program perlu memahaminya dengan cara menginterpretasikan fenomena tersebut secara mendalam dalam konteksnya yang khas, tanpa perlu merisaukan representasinya atas fenomena lain yang sejenis, yang biasa dilakukan dengan analisis statistika sesuai paradigma fungsionalisme, obyektifisme atau fakta sosial (bdk. Sanapiah Faisal, "Filosofi dan Akar Tradisi Penelitian Kualitatif", dalam Burhan Bungin, 2003:3-17.). Pendekatan ini dipilih karena situasi dan masalah yang diteliti bukan berujud sesuatu yang sangat terukur secara kuantitatif, melainkan situasi dan masalah yang masih sedang berkembang dan memiliki beragam aspek sosial.

Berdasar paradigma tersebut, pendekatan RAP sesungguhnya lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Namun, hal ini tidak menghalangi dimanfaatkan data-

data yang bersifat kuantitatif dan metode-metode pengumpulan dan analisis data kuantitatif dalam RAP, dengan catatan kuantifikasi situasi sekadar sebagai alat bantu dan tidak boleh mereduksi fenomena sosial yang faktual terjadi dan dipahami melalui RAP itu sendiri.

KAJIAN TEORETIK

A. Konsep Implementasi Program

1. Pengertian Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab adalah: Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)" (Webster dalam Wahab, 2004:64).

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah: Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan". (Meter dan Horn dalam Wahab, 2004:65)

Pandangan Meter dan Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut: Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan". (Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab, 2004:68)

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

2. Pengertian Program

Program merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Program akan menunjang implementasi, karena dalam program telah dimuat berbagai aspek antara lain : a. Adanya tujuan yang ingin dicapai. b. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam mencapai tujuan itu. c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui. d. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan. e. Adanya strategi dalam pelaksanaan (Manila, 2006 : 43).

Selanjutnya Keban (2004 : 35), menyebutkan : Apakah program efektif atau tidak, maka stándar penilaian yang dapat dipakai adalah organisasi, interpretasi, penerapan.

Ketiga standar penilaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Organisasi

Maksudnya disini ialah organisasi pelaksanaan program. Selanjutnya organisasi tersebut harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alatalat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. Stuktur organisasi yang kompleks, stuktur ditetapkan sejak semula dengan desain dari berbagai komponen atau subsistem yang ada tersebut.

Sumber daya manusia yang berkualitas berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Aparatur dalam hal ini petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program. Tugas aparat pelaksana program yang utama adlah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan negara. Agar tugas-tugas pelaksana program dapat dilaksanakan secara efektif maka setiap aparatur dituntut memiliki kemampuan yang memadai sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Interpretasi

Maksudnya disini agar program dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwewenang. 1) Sesuai Dengan Peraturan Sesuai dengan peraturan berarti setiap pelaksanaan kebijaksanaan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku baik Peraturan

Tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten. 2) Sesuai Dengan Petunjuk Pelaksana. Sesuai dengan petunjuk pelaksana berarti pelaksanaan kebijaksanaan dari peraturan sudah dijabarkan cara pelaksanaannya pada kebijaksanaan yang bersifat administratif, sehingga memudahkan pelaksana dalam melakukan aktifitas pelaksanaan program. 3) Sesuai Petunjuk Teknis Sesuai dengan petunjuk teknis berarti kebijaksanaan yang sudah dirumuskan dalam bentuk petunjuk pelaksana dirancang lagi secara teknis agar memudahkan dalam operasionalisasi program. Petunjuk teknis ini bersifat strategis lapangan agar dapat berjalan efisien dan efektif, rasional dan realistis.

c. Penerapan

Maksudnya disini peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat ini harus dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan yang disiplin. 1) Prosedur kerja yang jelas Prosedur kerja yang sudah ada harus memiliki prosedur kerja agar dalam paelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih, sehingga tidak bertentangan antara unit kegiatan yang terdapat di dalamnya. 2) Program kerja Program kerja harus sudah terprogram dan terencana dengan baik, sehingga tujuan program dapat irealisasikan dengan efektif 3) Jadwal kegiatan Program yang sudah ada harus dijadwalkan kapan dimulai dan diakhiri suatu program agar mudah dalam mengadakan evaluasi. Dalam hal ini yang diperlukan adanya tanggal pelaksanaan dan rampungnya sebuah program sudah ditentukan sebelumnya.

3. Pengertian Implementasi Program

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Unsur kedua yang harus di penuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya.

Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program di implementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya (eksekutif). Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan bertanggungjawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi. (Riggs, 2005:54).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan.

Gunakan mencapai tujuan impementasi program secara efektif, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan yang berupa penghimpunan sumber dana dan

pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Hasil yang diperoleh dari aksi pertama dapat disebut input kebijakan, sementara aksi yang kedua disebut sebagai proses implementasi kebijakan (Ratmiko, 2005:4).

Untuk mengoperasionalkan implementasi program agar tercapainya suatu tujuan serta terpenuhinya misi program diperlukan kemampuan yang tinggi pada organisasi pelaksanaannya. Model efektifitas implementasi program yang ditawarkan oleh Kertonegoro (2004 : 17), menyebutnya : Empat (4) faktor dalam melaksanakan suatu kebijakan, yakni: komunikasi, sumber-sumber, kecenderungankecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi.

B. Konsep Riset Aksi

1. Pengertian Riset Aksi

RAP adalah kegiatan riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara masyarakat warga dalam suatu komunitas atau lingkup sosial yang lebih luas untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif (perubahan kondisi hidup yang lebih baik). Dengan demikian, sesuai istilahnya, RAP memiliki tiga pilar utama, yakni metodologi riset, dimensi aksi, dan dimensi partisipasi. Artinya, RAP dilaksanakan dengan mengacu metodologi riset tertentu, harus bertujuan untuk mendorong aksi transformatif, dan harus melibatkan sebanyak mungkin masyarakat warga atau anggota komunitas sebagai pelaksana RAP-nya sendiri.

Metodologi RAP sesungguhnya berasal dari kerangka metodologi riset-riset konvensional lain. Perbedaannya dari riset-riset konvensional adalah bahwa peneliti/praktisi RAP tidak memisahkan diri dari situasi masyarakat yang diteliti, melainkan melebur ke dalamnya dan bekerja bersama warga dalam melakukan RAP. RAP membahas kondisi masyarakat berdasarkan sistem makna yang berlaku di situ, bukan menurut disiplin ilmu tertentu di luar budaya masyarakat tersebut. RAP tak bisa lagi berposisi "bebas nilai" dan tidak memihak seperti yang dituntut ilmu pengetahuan sebagai syarat obyektivitas, melainkan harus memihak pada kelompok yang lemah, miskin, dirugikan, dan menjadi korban.

Selain itu, RAP tidak berhenti pada publikasi hasil riset (laporan) dan rekomendasi untuk riset berikutnya, melainkan berorientasi pada perubahan situasi, peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat warga untuk memahami dan mengubah situasi mereka menjadi lebih baik. Singkatnya, RAP sungguh-sungguh mengaktualisasikan kegiatan riset sebagai langkah mengambil bagian dalam proses penyadaran dan pemberdayaan masyarakat seperti yang diteladankan Paulo Freire dari Brasil sejak tahun 1960-an dan para pengikutnya yang terus berkembang dewasa ini.

2. Paradigma dan Pendekatan Riset Aksi

RAP lebih didasari paradigma fenomenologis, atau seringkali pula disebut paradigma interpretivisme, subyektifisme, atau definisi sosial. Paradigma ini didasari asumsi bahwa realitas sosial berlaku secara khas, subyektif dan kontekstual secara ruang dan waktu, sehingga peneliti perlu memahaminya dengan cara menginterpretasikan fenomena tersebut secara mendalam dalam konteksnya yang khas, tanpa perlu merisaukan representasinya atas fenomena lain yang sejenis, yang biasa dilakukan dengan analisis statistika sesuai paradigma fungsionalisme, obyektifisme atau fakta sosial (bdk. Sanapiah Faisal, "Filosofi dan Akar Tradisi Penelitian Kualitatif", dalam Burhan Bungin, 2003:3-17.). Pendekatan ini dipilih karena situasi dan masalah yang diteliti bukan berujud sesuatu yang sangat terukur secara kuantitatif, melainkan situasi dan masalah yang masih sedang berkembang dan memiliki beragam aspek sosial.

Berdasar paradigma tersebut, pendekatan RAP sesungguhnya lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Namun, hal ini tidak menghalangi dimanfaatkan data-data yang bersifat kuantitatif dan metode-metode pengumpulan dan analisis data kuantitatif dalam RAP, dengan catatan kuantifikasi situasi sekadar sebagai alat bantu dan tidak boleh mereduksi fenomena sosial yang faktual terjadi dan dipahami melalui RAP itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data adalah studi pustaka. Metode yang akan digunakan untuk pengkajian ini studi literatur. Data yang diperoleh dikompulsi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literatur (Nana Syaodih & Sukmadinata, 2005; Sugiyono, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Berbasis Riset Aksi

1. Prinsip Pelaksanaan Metode RAP

Terdapat sejumlah prinsip yang memandu pelaksanaan RAP: **Pertama**, prinsip **Partisipasi**. Prinsip ini mengharuskan RAP dilaksanakan separtisipatif mungkin, melibatkan siapa saja yang berkepentingan dengan situasi yang sedang diteliti dan perubahan kondisi yang lebih baik. Dengan prinsip ini, RAP dilakukan bersama di antara masyarakat warga melalui proses berbagi dan belajar bersama, untuk memperjelas dan memahami kondisi dan permasalahan mereka sendiri. Prinsip ini juga menuntut penghargaan pada setiap perbedaan yang melatarbelakangi warga saat terlibat dalam RAP, termasuk penghargaan pada kesetaraan jender (terlebih jika dalam suatu komunitas warga perempuan belum memperoleh kesempatan yang setara dengan laki-laki untuk berpartisipasi sosial). Berbeda dengan riset konvensional, tim

peneliti dalam RAP bertindak sebagai fasilitator terjadinya proses riset yang partisipatif di antara warga, bukan tim peneliti yang meneliti kondisi komunitas dari luar sebagai pihak asing.

Kedua, prinsip Orientasi Aksi. Prinsip ini menuntut seluruh kegiatan dalam RAP harus mengarahkan masyarakat warga untuk melakukan aksi-aksi transformatif yang mengubah kondisi sosial mereka agar menjadi semakin baik. Oleh karena itu, RAP harus memuat agenda aksi perubahan yang jelas, terjadwal, dan konkret.

Ketiga, prinsip Triangulasi. RAP harus dilakukan dengan menggunakan berbagai sudut pandang, metode, alat kerja yang berbeda untuk memahami situasi yang sama, agar pemahaman tim peneliti bersama warga terhadap situasi tersebut semakin lengkap dan sesuai dengan fakta. Setiap informasi yang diperoleh harus diperiksa ulang lintas kelompok warga/element masyarakat (crosscheck). Prinsip ini menuntut RAP mengandalkan data-data primer yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti bersama warga di lapangan. Sedangkan data-data sekunder (riset lain, kepustakaan, statistik formal) dimanfaatkan sebagai pembandingan.

Keempat, prinsip Luwes atau Fleksibel. Meskipun RAP dilakukan dengan perencanaan sangat matang dan pelaksanaan yang cermat atau hati-hati, peneliti bersama warga harus tetap bersikap luwes menghadapi perubahan situasi yang mendadak, agar mampu menyesuaikan rencana semula dengan perubahan tersebut. Bukan situasinya yang dipaksa sesuai dengan desain riset, melainkan desain riset yang menyesuaikan diri dengan perubahan situasi.

2. Metode dan Alat Kerja RAP

Secara umum, metode RAP terbagi dalam dua tipe, yakni Eksplanatif dan Tematik. RAP Eksplanatif memfasilitasi komunitas/masyarakat untuk berpartisipasi dalam menganalisis kebutuhan, permasalahan, dan solusinya sebelum merencanakan aksi transformatif. Sedangkan RAP Tematik menganalisis program aksi transformatif yang sudah berjalan, sebagai alat evaluasi dan pengamatan (monitoring).

Dengan memanfaatkan kekayaan riset-riset konvensional yang masih terus berkembang, RAP melengkapi diri dengan banyak metode dan alat kerja. Untuk mengumpulkan data lapangan dan menganalisisnya, RAP memiliki metode berbagi cerita (sharing), wawancara mendalam (in-depth interview) dan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion/FGD). Dalam FGD misalnya, partisipan atau informan tidak sebatas berdiskusi dalam posisi duduk, melainkan bisa berdiskusi dalam dinamika tertentu dengan menggunakan alat kerja tertentu, misalnya pemetaan gagasan (mind mapping), diagram pohon masalah (problem tree), grafik kecenderungan (trend lines), matriks peringkat atau skala prioritas (ranking), diagram keterkaitan/diagram afinitas (linkage diagram), dsb.

Bahkan, penggalan informasi dari partisipan bisa dilakukan melalui permainan peran (role-play). Dalam dinamika tersebut, partisipan/informan berpeluang lebih

besar mengungkapkan pengalaman, gagasan, dan refleksi mereka secara lebih terbuka karena terbantu dengan sejumlah alat kerja yang memudahkan pengamatan (visual) dan kegiatan yang dinamis/tidak kaku. Dinamika tersebut juga memudahkan fasilitator untuk mendorong sebanyak mungkin partisipan/informan berpartisipasi lebih aktif karena menggunakan kegiatan dan alat kerja yang bisa dipilih atas dasar kesesuaiannya dengan latar belakang budaya, pendidikan, dan pekerjaan partisipan/informan.

Riset aksi mengembangkan teori kritis, dan kemudian melampauinya. Teori kritis menanyakan, 'Bagaimana situasi ini dapat dipahami untuk kemudian mengubahnya?' tetapi hanya bertujuan untuk memahami, bukan untuk aksi. Riset aksi bergerak menuju aksi dan menanyakan, 'Bagaimana ia bisa diubah?' Namun sebagian peneliti masih sering menempatkan riset aksi dalam kerangka umum teori kritis, yang menekankan sifat partisipatoris untuk memerangi hubungan kekuasaan yang ada.

Yang membedakan bentuk teori riset aksi adalah bahwa ia didasarkan pada sifat ontologis 'Aku' si peneliti, dan menggunakan logika di mana para peneliti mengorganisir pemikiran mereka seolah mereka mengalaminya pada saat itu. Banyak pendekatan riset mengadopsi sikap sebagai orang luar, menggunakan cara berpikir yang melihat benda-benda sebagai sesuatu yang terpisah satu sama lain. Sedangkan di sisi lain, periset aksi bekerja dengan pendekatan teori yang menggunakan cara berpikir yang melihat benda-benda sebagai sesuatu yang berhubungan satu sama lain. Perbedaan tersebut berimplikasi pada cara melakukan riset aksi di lapangan dan menteorisasikannya.

KESIMPULAN

Implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan.

Secara umum, metode RAP terbagi dalam dua tipe, yakni Eksplanatif dan Tematik. RAP Eksplanatif memfasilitasi komunitas/masyarakat untuk berpartisipasi dalam menganalisis kebutuhan, permasalahan, dan solusinya sebelum merencanakan aksi transformatif. Sedangkan RAP Tematik menganalisis program aksi transformatif yang sudah berjalan, sebagai alat evaluasi dan pengamatan (monitoring).

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, H.M. 1993. Ilmu Manajemen Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner. Jakarta: Bumi Aksara.
- Azra, Azyumardi. 1999. Manajemen Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

- Baharuddin, dkk. 2011. Dikotomi Manajemen Pendidikan Islam: Historitas dan Implikasi pada Masyarakat Islam. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hasan, Said Hamid "Transdisciplinarity dalam Pendidikan dengan Referensi Khusus pada Kurikulum", Makalah disajikan dalam Seminar tentang Transdisciplinarity, di Univeristas Negeri Jakarta, 29 Oktober 2007.
- Mawardi, Imam. "Transinternalisasi Budaya Manajemen Pendidikan Islam: Membangun Nilai Etika Sosial dalam Pengembangan Masyarakat". Hunafa Jurnal Studi Islamika STAIN Palu. Vol. 8, No.1, Juni 2011
- Muhaimin. 2005. Pengembangan Kurikulum Manajemen Pendidikan Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mujib, Abdul dan Mudzakkir, Jusuf. 2008. Ilmu Manajemen Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana. Miller, Jhon P. 1996. The Holistic Curriculum. Toronto: OISE Press.
- Qomari. 2010. Pendidikan Holistik: Penumbuh Spiritualitas. [Online]. Tersedia: <http://www.semipalar.net/artikel> [12 Maret 2012].
- Ramayulis, 1990. Metodologi Pengajaran Agama Islam. Jakarta: Kalam Mulia.
- UNESCO. 1998. "Transdisciplinarity: Stimulating Synergies, Integrating Knowledge" [Online]. Tersedia: <http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001146/114694eo.pdf> [12 November 2011].
- Zamroni. 2000. Paradigma Pendidikan Masa Depan. Yogyakarta: Bigraf Publishing